

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan atas manfaat memiliki NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP. Dengan demikian, kebutuhan WP atas manfaat memiliki NPWP tidak membuat tingkat kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP meningkat.
2. Kemudahan bagi WP dalam urusan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kemudahan bagi WP dalam urusan perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP.
3. Sanksi pajak bagi WP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP. Dengan demikian, sanksi pajak bagi WP tidak membuat tingkat kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP meningkat. Hal ini berarti ketegasan sanksi tidak efektif untuk diterapkan karena sanksi tidak membuat pemilik PGS untuk patuh dalam memiliki NPWP.
4. Persepsi WP tentang pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP. Dengan demikian, persepsi WP terhadap pajak yang buruk akan

berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan WPOP untuk memiliki NPWP karena mereka enggan untuk membayar pajak jika tidak digunakan untuk membiayai pembangunan negara.

5.2 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan pada penelitian ini adalah penelitian ini memiliki topik yang sangat sensitif bagi pemilik toko PGS, sehingga cukup banyak yang menolak untuk mengisi kuesioner.

5.3 Saran

Beberapa masukan dan saran yang dapat diberikan sesuai dengan hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan melakukan pengembangan dengan menggunakan faktor-faktor lain seperti faktor pengetahuan terhadap sanksi pajak, untuk membuktikan tingkat kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP.
2. Bagi pemerintah, perlu untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat memiliki NPWP sehingga WP dapat memahami dengan jelas manfaat dari memiliki NPWP selain itu, pemerintah sebaiknya memperbaiki persepsi yang buruk mengenai perpajakan di Indonesia dengan melaksanakan tugasnya didasarkan pada kejujuran dan keteguhan terhadap nilai-nilai dan prinsip yang dianut, sehingga masyarakat percaya bahwa dana pajak digunakan untuk kepentingan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, H. P., 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas, Skripsi Dipublikasikan, Semarang: Program S1 Universitas Diponegoro Semarang.
- Chakim, L., 2011. Optimalisasi Kualitas Pelayanan Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Secara Sukarela (*Voluntary Compliance*), (<http://lutfichakim.blogspot.com> diunduh tanggal 10 September 2013).
- Data Kementerian Koperasi dan UMKM, 2012, Jumlah UMKM di Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Republik Indonesia No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- Dunia Psikologi, 2012. Persepsi; Pengertian, Definisi, dan Faktor yang Memengaruhi, 16 Februari 2012, (<http://www.duniapsikologi.com> diunduh tanggal 17 September 2013).
- Fuadi, A. O., dan Y. Mangoting, 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, *Tax and Accounting Review*, Vol. 1, No.1.
- Gatranews, 2013, “Ini Alasan Dirjen Pajak Kenakan PPh 1% Omzet Untuk UKM”, 28 Juni 2013, (<http://www.gatra.com> diunduh tanggal 3 November 2013).
- Ghozali, I., 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Semarang: Badan Penerebit Universitas Diponegoro.
- Info Banknews*, 2012. Potensi Wajib Pajak di Indonesia, 15 Agustus 2012, (<http://www.infobanknews.com> diunduh tanggal 22 Agustus 2013).
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan (Edisi Revisi), Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor PER-20/PJ/2013, Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomorpokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor PER-38/PJ/2013, Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak.

Prastowo, Y., 2009. Manfaat dan Resiko Memiliki NPWP, Jakarta: Raih Asa Sukses.

Priantara, D., dan B. Supriyadi, 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 12, No.2, November:98-107.

Putri, P. W., 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Survey pada Wajib Pajak Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Batu), Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol. 1, No. 2.

Rahmatika, M., 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah, Skripsi Dipublikasikan, Jakarta: Program S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Robbins, S. P., 2008. Perilaku Organisasi, Jakarta: Salemba Empat.

Sunyoto, 2012. Analisis Validitas dan Asumsi Klasik, Yogyakarta: Gava Media.

- Syahril, F., 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok), Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 2.
- Tribun Jambi, 2013, “UKM Harus Punya NPWP”, 29 Juni 2013, (<http://jambi.tribunnews.com/2013/06/29/ukm-harus-punya-npwp> diunduh tanggal 3 November 2013).
- UKM Surabaya.com, 2011. Pusat Grosir Surabaya (PGS), 16 Juni 2011, (<http://ukmsurabaya.blogspot.com/2011> diunduh tanggal 15 November 2013).
- Umar, H., 2011. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis, Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, 2009. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
- Zahidah, C., 2010. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan, Skripsi Dipublikasikan, Jakarta: Program S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.